

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH 2018-2020

Kiara Sabila Haque, Abdul Rohman¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl.Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of local revenue, capital expenditure, the size of the local government, and balancing funds on the financial performance of district and municipal governments in Central Java Province in 2018-2020. The independent variables used in this study are local revenue, capital expenditure, local government size and balancing funds, and the dependent variable is local government financial performance.

The data used in this study is secondary data sourced from the Regional Government Financial Report and Audit Report which includes the APBD Realization Report and the Financial Statement Balance. The data was obtained from the BPK Representative of Central Java Province. This study uses multiple linear regression analysis on SPSS software.

The results of the study show that local revenue does not affect the financial performance of local governments. Capital expenditures have a positive and significant effect on the financial performance of local governments. The size of the local government has a positive and significant effect on the financial performance of the local government. Balancing funds do not affect the financial performance of local governments.

Keywords: local revenue, capital expenditure, local government size and balancing funds, local government financial performance.

PENDAHULUAN

Provinsi yang menerapkan otonomi wilayah dan desentralisasi berlandaskan ketentuan diatas yaitu salah satunya adalah Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya desentralisasi akan menjadi salah satu upaya untuk dapat meningkatkan kemandirian pada pembangunan daerah di daerah otonom. Telah diatur dalam PP Pasal4 No. 105 Tahun 2000 menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah mesti dilaksanakan dengan teratur, turut, aplikatif, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab terhadap peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan keadilan dan kepatuhan (Julitawati et al., 2012). Dengan adanya pengelolaan keuangan yang sesuai dengan penerapan akuntabilitas pemerintah akan terciptanya pemerintah yang baik.

Otonomi dalam desentralisasi mewajibkan masing-masing wilayah untuk mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bermaksud menyeraskan strategi ekonomi serta kapasitas yang tersaji hingga dalam mendistribusikannya sinkron dengan strategi pemerintah dengan tepat. Secara mandiri pemerintah daerah melakukan pengelolaan keuangan daerah yang memiliki tujuan supaya pelaksanaan pembangunan mampu dirampungkan dan tidak perlu menunggu dana pusat (Antari and Sedana 2018). Maka dari itu pentingnya penyajian laporan keuangan dengan pengelolaan keuangan yang efektif sebagai pengukuran kinerja keuangan serta upaya transparansi pengelolaan keuangan kepada masyarakat. Peran pengukuran kinerja keuangan menjadi cerminan sebagai penilaian dengan adanya kinerja keuangan di daerah tersebut dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Sari & Mustanda, 2019).

Pemerintah daerah di Indonesia menghadapi permasalahan keuangan yang terjadi, salah satunya ialah bergantungnya pemerintah daerah kepada pemerintah pusat disertai adanya minim kemampuan daerah tersebut untuk menggali asal pendapatan yang berpotensi (Kurniawati, 2017). Asal pendapatan tersebut yakni pendapatan asli daerah (PAD). PAD ialah sumber penghasilan daerah utama didapat dari peningkatan potensi suatu wilayah dengan bentuk digali belandaskan peraturan daerah sesuai ketetapan undang-undang dan digunakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

¹ Corresponding author

Pengeluaran anggaran yang disebut belanja modal memberikan manfaat lebih untuk penerimaan aset tetap dalam satu periode tertentu. Semakin meningkat pelayanan publik yang diberikan, semakin baik pengelolaan pembelanjaan pemerintah daerah dan diharapkan mampu memberikan dampak langsung atau tidak langsung sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah juga meningkat.

Ukuran pemerintah yakni ukuran besar atau kecilnya pemerintah suatu wilayah sehingga bisa diartikan bahwa besarnya pemerintah daerah tersebut menunjukkan lebih baiknya kinerja keuangan dibanding kecilnya ukuran yang dimiliki daerah tersebut. Besarnya ukuran pemerintah, maka besar pula kemungkinan keringanan pemerintah daerah untuk menjalankan aktivitas operasionalnya, begitu pula sebaliknya apabila semakin kecil ukuran pemerintah maka pelaksanaan kegiatan operasionalnya hendak cenderung mengalami kesulitan.

Dana perimbangan memiliki peranan penting untuk mencapai efisiensi dalam penyediaan layanan publik maka dari itu hal tersebut memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Di samping itu, beriringan dengan pentingnya diadakan DP akan mengakibatkan pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat. Hingga hal itu menandakan bahwa semakin besarnya DP yang berarti *region government* bergantung kepada pemerintah pusat, maka kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut semakin menurun.

Dengan pesatnya pembangunan daerah yang dilakukan disertai turunnya kondisi keefektifan pengelolaan keuangan hendak memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya. Untuk mengukur kinerja keuangan tersebut dapat menggunakan *effectiveness ratio* yang mengindikasikan tingkat kapabilitas daerah yang dapat diperoleh dengan target dan realisasi dari penerimaan PAD.

Pengujian ini dilakukan kembali terkait beberapa faktor-faktor yaitu pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan yang bersumber pada penelitian sebelumnya oleh Awwaliyah et al., (2019). Fokus dari penelitian Awwaliyah et al., (2019) yakni kemandirian suatu pemerintah daerah, sedangkan penelitian ini yaitu mengenai pengelolaan keuangan suatu pemerintah daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh faktor-faktor yaitu pendapatan asli daerah, belanja modal, ukuran pemerintah daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja modal dan ukuran pemerintah daerah digunakan sebagai variabel independen tambahan yang diuji dalam penelitian ini serta memberikan kontribusi dalam penelitian sebelumnya. Sampel penelitian ini yaitu Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2020. Dipilihnya Provinsi Jawa Tengah menjadi sampel penelitian dikarenakan Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan keefektifan dalam pengelolaan keuangan pada tahun 2018-2020 dibanding provinsi lainnya berkembang dengan pesatnya pembangunan yang telah maupun sedang dilakukan serta perekonomian yang meluap yaitu Provinsi Sumatra Utara dan DKI Jakarta.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori agensi memiliki konsep yakni kaitan antara prinsipal serta agen. Jensen dan Meckling (1976) mencetuskan bahwa adanya kaitan agency timbul sebagai kontrak disaat principal menangani agen untuk melakukan beberapa layanan dalam mendelegasikan wewenang untuk pengambilan keputusan. Teori agensi berupaya menangani *problem* agensi yang ada antara pihak yang samasama berkolaborasi dengan tujuan dan pembagaian kerja yang berbeda. (Girsang 2015). Dalam penelitian ini, dari sisi masyarakat (*principal*) merasa kurang puas dari hasil performa yang digarap oleh pemerintah daerah (*agent*). Dari sisi pemerintah daerah (*agent*) kurang memperhatikan kepentingan masyarakat umum (*principal*) melainkan memementingkan kesejahteraannya sendiri. Bentuk dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya yaitu melaporkan kinerjanya melalui laporan keuangan setiap periodenya sebagai pengungkapan informasi kepada publik untuk mengurangi *agency cost*.

Relevansi antara teori keagenan dengan kinerja keuangan dapat dipandang dari adanya peran pengelolaan keuangan pemerintah daerahnya. Dalam mengelola keuangan daerahnya, pemerintah daerah hendak memiliki sumber-sumber keuangan melalui pendapatan asli daerah,

belanja modal dan ukuran pemerintah daerah serta memperhatikan dana perimbangan dalam menilai kinerja keuangan. Bentuk dari tanggungjawab pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya yaitu melaporkan performanya dengan laporan keuangan tiap periodenya.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Mendagri No. 13 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan tentang kinerja atau performa ialah hasil capaian aktivitas yang sudah ataupun rencana yang akan dilakukan berhubungan dengan ternilai kuantitas dan kualitasnya dari penggunaan anggaran. Kinerja keuangan pemerintah daerah mewujudkan tingkat capaian hasil kerja pada keuangan daerah yang terdiri dari belanja daerah dan penerimaan dengan menerapkan *financial system* yang ditentukan oleh suatu strategi atau ketetapan aturan undang-undang selama berjalannya setiap periode anggaran (Sari, 2016). Menurut Halim, (2007) pengertian dari kinerja keuangan pemerintah daerah adalah standar atau menjadi patokan untuk mengetahui kapabilitas daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

Dalam menilai kinerja yang telah dilaksanakan terdapat analisis kinerja keuangan dengan berbagai analisis untuk mendapatkan kemampuan kinerja yang akan datang (Nugroho dan Rohman, 2012). Analisis dalam menilai suatu ukuran kinerja dapat diukur menggunakan berbagai indikator salah satunya yaitu indikator keuangan (Sularso dan Restianto, 2011)

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berlandaskan UU No. 33 Tahun 2004 Pendapatan asli daerah bermaksud dalam mendanai pelaksanaan otonomi daerah dengan menyerahkan otoritas kepada pemerintah daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Pemerintah daerah akan mengurangi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat jika pendapatan asli daerah memiliki kontribusi kepada pertumbuhan penghasilan daerahnya (Antari and Sedana 2018).

Selaras bersama teori agnesi yang menjabarkan bahwa apabila terjadinya kenaikan pendapatan asli daerah yang dikendalikan oleh pemerintah daerah (*agent*) maka kinerja keuangan akan dinilai baik oleh masyarakat (*principal*). Jika besarnya PAD yang didapat maka akan menaikkan penerimaan daerah sehingga kinerja keuangan dinilai semakin baik.

H1 : Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Salah satu upaya agar Pemerintah Daerah dapat mewujudkan tujuannya dalam mengadakan sarana dan prasarana publik termasuk infrastruktur yaitu melalui *capital expenditure*. BM adalah anggaran yang dikeluarkan *regional government* dalam rangka mendapatkan aset tetap dengan masa manfaatnya > 1 tahun. Hal ini menandakan bahwa belanja modal berperan sebagai *investment activity* pemerintah daerah yang tidak mencari profit, melainkan dengan menghasilkan sumber-sumber keuangan serta mampu memberikan kontribusi dalam pendapatan daerah (Antari dan Sedana, 2018).

Perihal ini sejalan dengan teori keagenan yang menjelaskan bahwa apabila pemerintah daerah (*agent*) memberikan pelayanan belanja modal berupa sarana dan infrastruktur dengan maksimal, maka mempermudah masyarakat (*principal*) dalam melaksanakan kegiatan operasional. Jika infrastruktur dan sarana telah memadai, pelayanan terhadap masyarakat meningkat sehingga menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik pula.

H2 : Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam melaksanakan pengakuan financial performance, pemerintah yang mempunyai size yang besar maka tekanan yang dimiliki besar pula. Artinya, pemerintah daerah yang mempunyai ukuran yang besar dapat mengupayakan untuk memperoleh lebih baiknya kinerja yang dilakukan daripada pemerintah daerah yang ukurannya kecil (Sari, 2016). Kegiatan operasional pemerintah daerah akan mudah berjalan salah satunya pemberian pelayanan publik, apabila pemerintah memiliki ukuran yang besar dan diiringi dengan meningkatnya kinerja keuangan.

Hal ini berhubungan dengan penelitian Anggraeni (2020) menggunakan ukuran pemerintah yang diukur dengan total asset. Disaat pemda memiliki otoritas untuk mengendalikan asset daerah untuk urgensi publik, terdapat hubungan teori agensi yang muncul. Suatu daerah yang memiliki size pemerintah yang berupa total aset yang lebih besar maka pemerintah daerah (agent) akan maksimal serta optimal dalam melayani masyarakat (principal) sebagai suatu tuntunan terhadap kinerja keuangan akan meingkat siring dengan ukuran aset yang besar.

H3 : *Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah*

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dana perimbangan ialah dana pendapatan APBN dibagikan pada daerah untuk menyediakan biaya keperluan daerah dengan tujuan implementasi desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004). Terjadi defisit jika lebih besarnya realisasi belanja daerah dari penerimaan penghasilan daerah. Maka dari itu, pemerintah daerah mendapat dana kiriman atau transfer dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan dalam rangka menutup kekurangan belanja daerah tersebut.

Sejalan dengan teori keagenan yang menjelaskan bahwa peran pemerintah pusat (*principal*) mendelegasikan wewenangnya yakni memberikan kebebasan dalam mengatur kegiatannya terhadap pemerintah daerah (*agent*). Maka dari itu besarnya dana perimbangan menandakan ketergantungan pemerintah daerah (*agent*) terhadap pemerintah pusat (*principal*) sehingga mampu menurunkan kinerja keuangan.

H4 : *Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah..*

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah. Serta variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, belanja modal, ukuran pemerintah daerah dan dana perimbangan.

Tabel 1
Variabel dan Pengukuran

Variabel	Pengukuran
Kinerja Keuangan	Rasio Efektivitas = (Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah) / (Target Penerimaan PAD yang ditetapkan)
Pendapatan Asli Daerah	PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan + Lain-Lain PAD Yang Sah
Belanja Modal	Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya
Ukuran Pemerintah Daerah	Ukuran Pemerintah Daerah = Total Aset
Dana Perimbangan	Dana perimbangan = Dana Bagi Hasil + Dana Alokasi Umum + Dana Alokasi Khusus

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini ialah keseluruhan Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah yang mencakup 35 kabupaten atau kota yakni 29 Kabupaten serta 6 Kota. Selain itu, data penelitian ini menggunakan data 3 tahun terakhir yakni tahun 2018 – 2020 karena merupakan tahun terbaru dalam pelaporan keuangan serta menunjukkan kondisi yang relevan dengan kinerja keuangan pemda terkini.

Sampel pada penelitian ini memerlukan seluruh populasi itu sendiri atau dapat disebut pengambilan sampel dengan metode sampling jenuh. Dokumen yang digunakan yaitu Laporan Realisasi APBD dan Neraca Laporan Keuangan yang tercantum pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah. Data penelitian yaitu LHP LKPD didapat dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Serta data mengenai jumlah Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan tertera di dalam Laporan Realisasi APBD dan Ukuran Pemerintah Daerah yang tercantum di dalam Neraca Laporan Keuangan.

Metode Analisis

Hipotesis pada penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Dilakukannya metode analisis regresi linier berganda bertujuan yakni menunjukkan tanda adanya atau tidak adanya hubungan antara variabel independen yang lebih dari satu terhadap variabel dependen. Dari penelitian ini yaitu untuk menentukan hubungan antara pendapatan asli daerah, belanja modal, ukuran pemerintah daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Rumus pengolahan data menggunakan SPSS yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y	= Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
α	= Konstanta Regresi
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \text{ dan } \beta_4$	= Koefisien regresi variabel independen
X_1	= Pendapatan Asli Daerah
X_2	= Belanja Modal
X_3	= Ukuran Pemerintahan
X_4	= Dana Perimbangan
ε	= Koefisien Error atau Tingkat Kesalahan Pengganggu

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Sampel di penelitian ini yaitu Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah mencakup 29 Kabupaten serta 6 Kota Tahun 2018-2020, maka data keseluruhan sebanyak $35 \times 3 = 105$ data. Data yang mempunyai karakteristik unik atau memiliki angka yang beda jauh dari pengamatan lainnya yang bisa dikatakan muncul dalam bentuk nilai ekstrim disebut data outlier (Ghozali, 2018a). Salah satu penyebab munculnya data outlier pada penelitian ini yaitu outlier memiliki data ekstrim dan data tidak memiliki distribusi yang normal yaitu sebanyak 7 sampel yaitu terdiri dari Kabupaten Magelang Tahun 2019, Kota Semarang Tahun 2017, 2018 dan 2019, Kota Surakarta Tahun 2018, serta Kabupaten Batang Tahun 2018. Maka sampel akhir yang digunakan pada penelitian ini sejumlah 98 sampel.

Tabel 2 Perolehan Sampel Data

No.	Kriteria	Jumlah Sampel
1	Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020	105
2	Outlier	7
3	Jumlah sampel penelitian	98

Statistik Deskriptif

Pada hasil yang diperoleh dari statistik deskriptif sebagaimana tertera di tabel 3, bahwa telah disajikan sebagai berikut:

Tabel 3 Statistik Deskriptif

N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
---	---------	---------	------	----------------

PAD	98	179224408698,00	686805512326,0 0	353823529862,0 000	103279236138 ,23079
BM	98	113622507976,00	663321198006,0 0	372827458570,2 652	122543255447 ,11824
UPD	98	1699744280051,0 0	11719105713695 ,00	3792597705249, 6730	143575269534 3,06130
DP	98	553115007612,00	1940352355633, 00	1316206286548, 6626	357325155661 ,63055
Kinerja Keuangan	98	,84	1,37	1,0693	,10717
Valid N (listwise)	98				

Sumber: Output dari SPSS, olahan data 2022

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 4 Uji T (Parsial)

	Model	t	Sig.	Kesimpulan
	(Constant)	24,413	0,000	
1	PAD	-1,250	0,214	Tidak Signifikan
	BM	-2,400	0,018	Signifikan
	UPD	3,701	0,000	Signifikan
	DP	1,321	0,190	Tidak Signifikan

Sumber: Output dari SPSS, olahan data 2022

Dari hasil pengujian T yang tertera tabel di atas menunjukkan bahwa signifikansi variabel PAD sebesar 0,214 dan DP sebesar 0,190 yaitu $\text{sig} > 0,05$. Hal ini menerangkan bahwa variabel PAD dan DP mempunyai pengaruh tidak signifikan dengan arah koef regresi pada variabel PAD negatif dan DP positif. Selanjutnya, pada variabel BM dan UPD memiliki nilai $\text{sig} < 0,05$ yakni BM sejumlah 0,018 dengan koef regresi arah negatif dan UPD sebesar 0,000 dengan koefisien regresi positif. Hal tersebut menandakan bahwa variabel BM memiliki pengaruh negatif secara signifikan dan UPD memiliki pengaruh positif secara signifikan.

Tabel 5 Uji F (Simultan)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,167	4	,042	4,096	,004 ^b
Residual	,947	93	,010		
Total	1,114	97			

Sumber: Output dari SPSS, olahan data 2022

Dari hasil uji F pada dibawah ini menerangkan bahwa signifikansi sejumlah 0,004 yaitu $\text{sig} < 0,05$. Hal tersebut menandakan bahwa variabel independen dengan cara bersamaan terdapat pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 6 Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
-------	---	----------	-------------------

1 ,387^a ,150 ,113

Sumber: Output dari SPSS, olahan data 2022

Pengujian koefisien determinasi (R^2) diperlukan dalam rangka menakar berapa besarnya peran variabel bebas atas variabel terikat dengan model regresi linear berganda. Pada hasil uji dibawah ini menunjukkan (R^2) sebesar 0,113 atau 11,3%. Artinya, angka 11,3% model dapat dipaparkan oleh variabel bebas yaitu PAD, BM, UPD dan DP. Sementara itu sisanya yaitu 88,7% lainnya dapat dipengaruhi dari di luar variabel penelitian ini.

Tabel 7 Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	1,043	,043	Beta	24,413	,000
	PAD	-1,848E-13	,000	-,178	-1,250	,214
	BM	-2,980E-13	,000	-,341	-2,400	,018
	UPD	3,260E-14	,000	,437	3,701	,000
	DP	6,030E-14	,000	,201	1,321	,190

Sumber: Output dari SPSS, olahan data 2022

Pada penelitian ini dilakukannya analisis regresi linear berganda untuk diketahuinya adanya atau tidaknya pengaruh dari variabel PAD, BM, UPD dan DP terhadap Kinerja Keuangan. Berikut ini hasil analisis regresi linear berganda

Sehingga terbentuk persamaan regresi yang diperoleh yaitu:

$$\text{Kinerja Keuangan} = 1,043 - 0,0000000000001848 \text{ PAD} - 0,0000000000002980 \text{ BM} + 0,0000000000003260 \text{ UPD} + 0,0000000000006030 \text{ DP}$$

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis yang pertama yakni pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil uji statistik didapat koefisien variabel dengan arah negatif sebanyak -0,0000000000001848 serta nilai signifikansi sebanyak 0,214. Apabila nilai signifikansi > 0,05 serta koef variabel dengan arah positif berarti hasil dari uji tersebut yakni memiliki hubungan tidak signifikan dan negatif pada variabel. Artinya, PAD berpengaruh negatif secara tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Output yang serupa bersama hasil penelitian Wahyuningsih, (2016) mengemukakan bahwa PAD tidak memiliki pengaruh terhadap performa keuangan pemda. Hal tersebut sehubungan dengan kemampuan suatu pemerintah dalam mengelola APBD menjalankan tugas-tugas nya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Khususnya PAD sebagai sumber pendapatan bersih yang asalnya dari daerahnya masing-masing, maka dari penelitian ini menandakan bahwa terdapat kurangnya keoptimalan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dari potensi yang ada. Salah satunya belum efektifnya serta belum selektifnya dalam pengimplementasian PAD yang dipastikan dari aktivitas pemda yang masih belum tepat pada target yang direncanakan. Penelitian ini didukung dari Martantri (2019) Azhar (2021) bahwa PAD tidak memiliki pengaruh terhadap performa keuangan pemerintah daerah Kab atau Kota di Jawa Tengah.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis yang kedua yakni belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari uji statistik didapat koefisien variabel negatif sebanyak -0,0000000000003031 serta nilai signifikansi sejumlah 0,000. Apabila nilai signifikansi < 0,05 dan koefisien negatif berarti hasil uji tersebut yakni memiliki hubungan signifikan dengan arah negatif pada variabel. Artinya, belanja modal berpengaruh negatif

secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Output serupa bersama hasil penelitian Antari & Sedana (2018) mengemukakan bahwa BM terdapat pengaruh negatif serta signifikan atas performa keuangan pemda. Kegiatan BM dapat disebut *investment activity* pemerintah daerah dengan tidak untuk mendapatkan keuntungan (*profit*). Asalnya sumber keuangan yang berasal dari kegiatan BM salah satunya pembangunan infrastruktur yang berupaya memberikan andil yang cukup besar terhadap pertumbuhan pendapatan daerah untuk masyarakat. Penyebab BM berpengaruh negatif yakni karena tidak seluruh kegiatan BM turut andil membentuk sumber keuangan dengan cara langsung bagi daerahnya masing-masing. Ketepatan target diukur dari sisi kualitas, komponen yang sesuai dengan jumlah yang direncanakan, waktu yang ditentukan, kegiatan yang diprioritaskan untuk publik, serta biaya yang tidak melebihi anggaran, tidak saja dari diukurnya pertumbuhan penerimaan daerah. Sehingga hal ini memengaruhi indikator keluaran (*outputs*) pada kinerja keuangan. Begitu pula penelitian dari Nugroho & Rohman, (2012) yang mengemukakan bahwa BM secara signifikan terdapat pengaruh negatif atas performa keuangan, salah satu faktornya ialah dengan meningkatnya pembangunan yang diadakan berakibat banyak oknum yang menjadikan kesempatan tersebut untuk berbuat tindakan korupsi. Hal itu didukung dengan adanya perbuatan korupsi yang diperbuat oleh Bupati Klaten serta Walikota Tegal pada tahun 2018 menurut Kompas.com sehingga menurunkan kinerja pemerintah dipandangan masyarakat, Penelitian ini didukung dari Darwanis & Saputra, (2014) yang menyatakan bahwa BM terdapat pengaruh negatif atas performa keuangan pemda.

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis yang ketiga yakni ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari uji statistik didapat koef variabel positif sejumlah 0,00000000000002332 serta nilai signifikansi sejumlah 0,004. Apabila nilai signifikansi $< 0,005$ dan koef dengan arah positif berarti hasil dari uji tersebut yakni memiliki hubungan signifikan dengan arah positif pada variabel. Artinya, ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Output ini serupa bersama penelitian dari Sari (2016) mengemukakan bahwa UPD berpengaruh positif serta signifikan atas performa keuangan pemda. Pengadaan serta penggunaan aset yang baik akan berdampak terhadap pelayanan yang optimal dari pemerintah daerah kepada publik. Sehingga indikator kinerja keuangan manfaat serta dampak terpenuhi yakni kepuasan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. UPD yang besar menandakan bahwa kekayaan yang dimiliki pemerintah daerah tersebut pun juga besar. Hingga adanya tekanan dari penduduk masyarakat dalam mengawasi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Hal tersebut mendorong serta memberi tekanan kepada pemerintah dalam meningkatkan performa keuangan yang lebih baik untuk memperoleh pemastian penduduk masyarakat bahwa pemda mampu terampil dalam menyajikan performa keuangan. Penelitian ini juga senada dari Ridho, (2021) dan Maiyora (2015) yang menerangkan bahwa UPD memiliki pengaruh positif atas performa keuangan pemda.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis yang keempat ini yakni dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil uji statistik didapat koef variabel positif sebanyak 0,0000000000000254 serta nilai signifikansi sebanyak 0,469. Apabila nilai signifikansi $> 0,005$ serta positif berarti hasil uji tersebut yakni memiliki hubungan tidak signifikan dan positif pada variabel. Artinya, dana perimbangan berpengaruh positif serta tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Output dari penelitian ini bersama dengan penelitian dari Pratiwi, (2018) yang menerangkan bahwa DP terdapat pengaruh positif tidak signifikan atas performa keuangan pemda. DP merupakan dana transfer dari pemda untuk mencukupi jika terjadinya defisit pada daerah tersebut. Bersamaan dengan hal itu, dana perimbangan diperlukan dalam percepatan pembangunan

daerah yang masih sangat dibutuhkan di setiap daerah. Daerah dengan kapasitas yang kurang masih memerlukan dana perimbangan supaya meraih standar pelayanan minimum. Sehingga terdapatnya DP yang disubsidikan oleh pemerintah pusat maka dapat terjadi kenaikan performa keuangan pemda. Akan tetapi pada pandangan lain, hal tersebut memperlihatkan tingkat kemandirian yang rendah pada suatu wilayah hingga meningginya tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat. Penelitian ini satu suara dengan penelitian Pratiwi, (2018) yang menerangkan bahwa DP memiliki pengaruh positif serta tidak signifikan terhadap performa keuangan pemda.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, pendapatan asli daerah dan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Namun penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu pada pengukuran variabel dependen yaitu kinerja keuangan terdapat kesamaan dengan variabel independen yaitu pendapatana asli daerah sehingga hasil penelitian yang kurang mempresentasikan. Serta terdapat 7 outlier sehingga jumlah sampel penelitian berkurang dari total sampel sebelumnya.

Penelitian selanjutnya dapat menambahkan faktor lainnya yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah seperti Belanja Operasi, Transfer Bagi Hasil Pendapatan, SiLPA, Pinjaman Dalam Negeri dan lain-lain sehingga dapat mempresentasikan faktor yang memengaruhi kinerja keuangan. Serta peneliti juga dapat menggunakan indikator lain dalam pengukuran kinerja keuangan seperti rasio efisiensi, rasio ekonomi, rasio kemandirian dan lain-lain.

REFERENSI

- Antari, Ni Putu Gina Sukma, and Ida Bagus Panji Sedana. 2018. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah." *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 7 (2): 1080.
- Awwaliyah, Noor Farieda, Ratno Agriyanto, and Dessy Noor Farida. 2019. "The Effect of Regional Original Income and Balance Funding on Regional Government Financial Performance." *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* 1 (1): 25. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2019.1.1.3745>.
- Azhar, Iqlima. 2021. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa," no. September 2021: 164–74.
- Darwanis, Darwanis, and Ryanda Saputra. 2014. "Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh)." *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis* 1 (2): 183–99. <https://doi.org/10.24815/jdab.v1i2.3628>.
- Girsang, Heri Atapson V. 2015. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Propinsi Banten*. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*. Vol. 9. <https://doi.org/10.35448/jrat.v9i2.4301>.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Julitawati, Darwanis, Jalaluddin. 2012. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh."
- Kurniawati, Fery Fitriana. 2017. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Akuntansi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kecamatan Se-Kabupaten Bantul)."
- Maiyora, Gita. 2015. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Studi Empiris Kabupaten Sumatera)." *JOMFekom* 4 (1): 1–13. <https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah-ditinja.pdf>.
- Martantri, Nurlita. 2019. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah." *Skripsi*, 75–76.

- <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/16695>.
- Nurdin, Nazar. 2018. "3 Kepala Daerah Di Jateng Jadi Tersangka, Ini Kata Gubernur Ganjar." <https://regional.kompas.com/read/2018/01/24/14005691/3-kepala-daerah-di-jateng-jadi-tersangka-ini-kata-gubernur-ganjar>.
- Pratiwi, Tri Yuni. 2018. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016." *Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2018*.
- Ridho, Iqbal Tigana. 2021. "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Legislatif, Dan Karakteristik Kepada Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah," 6.
- Rohman, Fajar Nugroho dan Abdul. 2012. "Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening." *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 1*: 1–18. <http://repository.umi.ac.id/handle/123456789/8707>.
- Sari, Indah Puspa. 2016. "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah." *JOM Fekon 4* (1): 679–92.
- Sari, Ni Made Diah Permata, and I Ketut Mustanda. 2019. "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah." *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana 8* (8): 4759. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i08.p02>.
- Smulowitz, Stephen, Manuel Becerra, and Margarita Mayo. 2019. "Racial Diversity and Its Asymmetry within and across Hierarchical Levels: The Effects on Financial Performance." *Human Relations 72* (10): 1671–96. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>.
- Wahyuningsih, Yoshinta Endah. 2016. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah." *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta 1* (1): 15–29. https://core.ac.uk/display/148609933?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1.